

**PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN MINAT PESERTA DIDIK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERHADAP MATA
PELAJARAN PPKn DI SMK NEGERI 7 BANDAR
LAMPUNG TAHUN PELAJARAN
2018/2019**

Skripsi

Oleh

GITA RAHMI PERTIWI



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

**PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN MINAT PESERTA DIDIK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERHADAP MATA
PELAJARAN PPKn DI SMK NEGERI 7 BANDAR
LAMPUNG TAHUN PELAJARAN
2018/2019**

**Oleh
Gita Rahmi Pertiwi**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang peran guru dalam meningkatkan minat peserta didik sekolah menengah kejuruan terhadap mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Jumlah populasi sebanyak 685 peserta didik dengan sampel diambil sebanyak 10% yaitu sebanyak 65 responden. Analisis data menggunakan Chi kuadrat dan teknik pengumpulan data menggunakan angket dan teknik penunjang menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru dalam meningkatkan minat peserta didik sekolah menengah kejuruan terhadap mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019 masuk dalam kategori sangat baik, guru telah menjalankan perannya dalam meningkatkan minat siswa SMK terhadap mata pelajaran PPKn dengan baik.

Kata Kunci: *Peran Guru, Minat, Mata Pelajaran PPKn*

ABSTRACT

TEACHER'S ROLE IN IMPROVING VOCATIONAL STUDENT'S MOTIVATION IN LEARNING CIVIC SUBJECT AT SMK NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG OF THE ACADEMIC YEAR 2018/2019

**By
Gita Rahmi Pertiwi**

The purpose of this research is to describe teacher's role in improving vocational student's motivation in learning civic subject at SMK Negeri 7 Bandar Lampung of the academic year 2018/2019. The research used descriptive quantitative method. Total of population is 685 students with the sample used in this research is 10% of the total population they are 65 respondents. The data analysis used Chi Kuadrat and the data collection technique used review and documentation.

The result of this research is to show teacher's role in improving vocational student's motivation in learning civic subject at SMK Negeri 7 Bandar Lampung of the academic year 2018/2019 according to a good category, the teacher was already good in increasing student's interests of vocational high school student in civic subject.

Keywords: *Teacher's Role, Interests, Civic Subjects*

**PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN MINAT PESERTA DIDIK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERHADAP MATA
PELAJARAN PPKn DI SMK NEGERI 7 BANDAR
LAMPUNG TAHUN PELAJARAN
2018/2019**

**Oleh
GITA RAHMI PERTIWI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN
Pada
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN
MINAT PESERTA DIDIK SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN TERHADAP MATA
PELAJARAN PPKn DI SMK NEGERI 7
BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN
2018/2019**

Nama Mahasiswa : **Gita Rahmi Pertiwi**

No. Pokok Mahasiswa : **1513032058**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

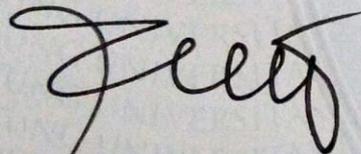
Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI

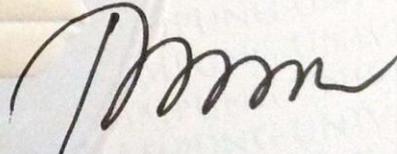
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP/ 19820727 200604 1 002

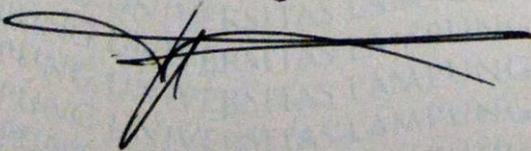
Pembimbing II,



Rohman, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0003068401

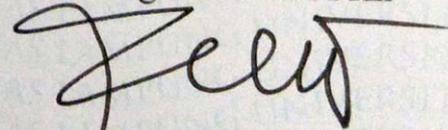
2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi PPKn



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

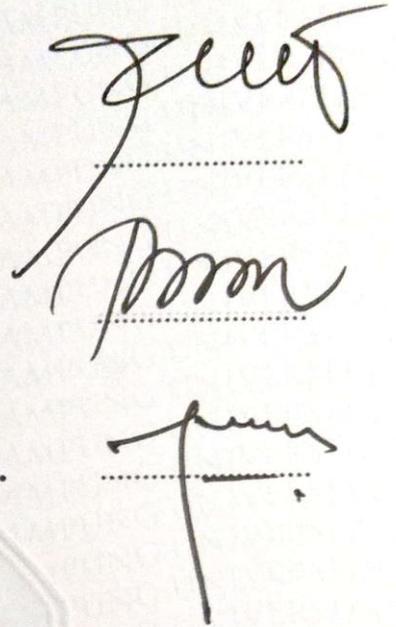
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

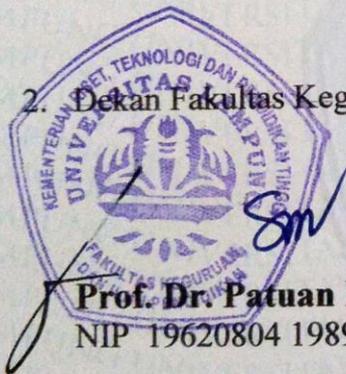
Sekretaris : **Rohman, S.Pd., M.Pd.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



Three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The first signature is 'Hermi Yanzi', the second is 'Rohman', and the third is 'Berchah Pitoewas'.

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
NIP 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Gita Rahmi Pertiwi
NPM : 1513032058
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan/Program Studi : Pendidikan IPS/PPKn

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 11 Juli 2019

Penulis



Gita Rahmi Pertiwi
1513032058

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 10 April 1997. Penulis adalah putri kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs.Hi.Ahmad Zainuddin, M. Ti dan Ibu Sukaesih. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis:

1. TK Pajajaran Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003
2. SD Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009
3. SMP Negeri 23 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun tahun 2012
4. SMA Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Pada bangku kuliah, penulis pernah menjadi bagian dari Forum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (FORDIKA). Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur serta Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Praja Utama Sribhawono selama kurang lebih 45 hari terhitung pada tanggal 11 Juli sampai dengan 25 Agustus 2018.

MOTTO

“Learn from the past, live for today and plan for tomorrow”

(Albert Einstein)

“Selalu bersyukur dalam menjalani hidup karena banyak orang lain diluar sana yang mengharapkan kehidupan sepertimu”

(Gita Rahmi Pertiwi)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan kecintaanku kepada:

Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan aku sayangi:

Ayahku Drs. Hi. Ahmad Zainuddin, M. Ti .dan Mamaku Hj.Sukaesih yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik, terimakasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan dan dukungan kalian demi keberhasilanku.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat akademis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Skripsi dengan judul **“Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Terhadap Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.”** Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

6. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
7. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd.,M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung sekaligus sebagai pembimbing akademik dan dosen pembimbing utama. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, ilmu, waktu, nasehat, dan tenaga selama ini. Terimakasih telah menjadi pembimbing yang baik, yang selalu memberikan saran dan menjadi tempat bertukar pikiran serta telah mengajari cara berfikir dan berkembang. Terimakasih banyak atas proses bimbingan yang sangat berkesan.
8. Bapak Rohman, S.Pd.,M.Pd selaku dosen pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan, motivasi, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini, terimakasih juga untuk canda tawa yang selalu bapak berikan ketika bimbingan.
9. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H selaku dosen pembahas I. Terimakasih atas setiap saran, kritik dan masukan yang membangun selama ini meskipun awalnya saya merasa takut saat mengetahui bahwa bapak pembahas saya, tetapi dengan saran yang bapak berikan itu membuat saya termotivasi untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi.
10. Bapak Teki P. Sulaksono, S.Pd.,M.Pd selaku dosen pembahas II. Terimakasih atas saran, dan nasehat yang selalu bapak berikan ketika bimbingan.
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Universitas Lampung terima kasih telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

12. Bapak Drs. Otong Hidayat, M.Pd selaku kepala SMK Negeri 7 Bandar Lampung yang sudah memberikan izin kepada peneliti.
13. Terimakasih untuk seluruh Bapak/Ibu Waka Kesiswaan serta Bapak/Ibu guru SMK Negeri 7 Bandar Lampung yang sudah meluangkan waktu nya.
14. Seluruh peserta didik SMK Negeri 7 Bandar Lampung terimakasih karena telah menyambut dengan hangat, dan sangat membantu kakak dalam melaksanakan penelitian ini.
15. Kedua orangtuaku, Ayah dan Mama terimakasih atas kasih sayang yang tak terhingga dan segala nya yang telah kalian korbankan selama ini. Terima kasih kalian selalu membimbing, menasehati, dan selalu menyayangiku, yang selalu mendoakanku dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk segalanya, skripsi ini Ata persembahkan untuk kalian.
16. Tetehtu tercinta Kisti Rahmi Awaliyah, S.Ds (Cistul) dan adikku Rizka Tiara Ramadhan, terimakasih atas semangat yang kalian berikan selama ini, yang membantu menemani aku dalam mengerjakan skripsi ini.
17. Spesial untuk Tubagus Muhammad Shofran Lanrifqo Laba, A.Md yang selalu mendengarkan keluh kesah Ata, yang selalu sabar mendengarkan curhatan Ata dan selalu memberikan semangat disaat Ata sudah pesimis dengan skripsi ini. Terimakasih sudah selalu ada saat Ata butuhkan dari dulu sampai sekarang, semoga iko selalu dalam lindungan Allah SWT.
18. Sahabat-sahabat ku Sistuuuuurs Neillisa Regga Syahputri, Melvy Nancilia Putri, Pranita Dewi Vanli, Ratu Maura Maghfira yang selalu ada disaat penulis membutuhkan, terimakasih untuk persahabatan ini yang sejak saat SMP hingga sekarang, yang selalu memberi kritik dan saran yang

membangun yang membuat penulis semakin termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk canda tawa kalian yang sangat berisik itu hehe. Semoga kita bisa sukses dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

19. Terimakasih teruntuk Meriana Kusumastuti dan Neillisa Regga Syahputri yang sudah menjadi sahabat terbaikku dari awal masuk perkuliahan sampai akhir perkuliahan dan akan selamanya, terimakasih untuk pengertian, canda tawa, motivasi dan semangat kalian untuk penulis.
20. Teruntuk Zamur Squad dan BNL Mew, Neillisa, Shelina, Cahaya, Ajeng, Ervinda, Bab, Nay, Ocon, Putri, Anu, Yori, Ucup, Paping, Pakih dan Rici. Terimakasih untuk canda tawa selama perkuliahan, bakal kangen sama perbullyan kita.
21. Teman-teman KKN Ngiri Abis Squad: Regi, Bela, Ica, Fidya, Tiur, Suri, Listya, Tino dan Novan terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman yang berharga untuk penulis, memberikan dukungan serta semangat.
22. Teruntuk semua penghuni gedung J terima kasih sudah banyak membantu penulis saat menyusun skripsi ini, kurang-kurangnya ya hehe.
23. Seluruh teman - teman PPKn 2015 yang berjiwa Pancasila yang telah menemani semasa perkuliahan, berpartisipasi, membantu, serta kenangan suasana ketika kuliah yang akan selalu penulis rindukan. Sangat bersyukur bisa mengenal kalian yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
24. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mempermudah penulis.
25. Serta almamater tercinta Universitas Lampung

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini ditulis dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan peneliti. Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau penelitian lanjutan. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 11 Juli 2019

Penulis

Gita Rahmi Pertiwi
1513032058

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWANCANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah	1
B.Identifikasi Masalah.....	9
C.Pembatasan Masalah.....	9
D.Rumusan Masalah	9
E.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F.Ruang Lingkup Penelitian.....	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori	13
1. Peran Guru	13
a. Pengertian Peran.....	13
b. Pengertian Guru	14
c. Peran Guru	15
2. Pengertian Minat.....	19
3. Pengertian Peserta Didik.....	20
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	20
a. Pengertian SMK	20
b. Tujuan SMK.....	21
5. Pendidikan	22
a. Pengertian Pendidikan.....	22

b. Tujuan Pendidikan	25
c. Teori-Teori Pendidikan	26
6. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	30
a. Sejarah Perkembangan PPKn di Indonesia	30
b. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	36
c. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	38
d. Fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	40
e. Objek Kajian PPKn	41
f. Ruang Lingkup PPKn.....	43
g. Kompeensi Dasar PPKn.....	45
B. Kerangka Fikir	47
C. Penelitian yang Relevan	48
1. Lokal	48
2. Nasional	49

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	51
B. Populasi dan Sampel	52
1. Populasi	52
2. Sampel.....	52
C. Variabel Penelitian	54
D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	55
1. Definisi Konseptual.....	55
2. Definisi Operasional.....	56
E. Rencana Pengukuran Variabel.....	57
F. Teknik Pengumpulan Data	58
1. Teknik Pokok	58
a. Angket.....	58
2. Teknik Penunjang.....	59
a. Wawancara.....	59
b. Dokumentasi.....	59
G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	60
1. Uji Validitas	60
2. Uji Reliabilitas.....	60
H. Teknik Analisis Data.....	66
I. Langkah-Langkah Penelitian	68
1. Persiapan Pengajuan Judul	68
2. Penelitian Pendahuluan	69
3. Pengajuan Rencana Penelitian	69
4. Pelaksanaan Penelitian	70
a. Persiapan Administrasi	70
b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data	70
5. Pelaksanaan Uji Coba Angket.....	71
a. Analisis Validitas Angket	71
b. Analisis Uji Reliabilitas Skala Sikap.....	71

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum SMK Negeri 7 Bandar Lampung.....	72
1. Sejarah Singkat SMK Negeri 7 Bandar Lampung	72
2. Keadaan Guru.....	74
3. Sarana dan Prasarana.....	74
B. Program Unggulan SMK Negeri 7 Bandar Lampung	75
C. Visi dan Misi SMK Negeri 7 Bandar Lampung.....	76
1. Visi	76
2. Misi.....	76
3. Tujuan SMK Negeri 7 Bandar Lampung	76
4. Sarana	77
D. Deskripsi Data.....	77
1. Pengumpulan Data	77
2. Penyajian Data.....	77
E. Pembahasan	112
1. Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik SMK.....	112
2. Esensi Mata Pelajaran PPKn	124

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	138

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Daftar Kejuruan SMK Negeri 7 Bandar Lampung	2
2. Data Daftar Peserta Didik SMK Negeri 7 Bandar Lampung	3
3. Populasi Penelitian	52
4. Sampel Penelitian Peserta Didik Kelas X	53
5. Sampel Penelitian Peserta Didik Kelas XI	54
6. Kriteria Reliabilitas	62
7. Hasil Uji Coba Skala Sikap Kepada 10 Orang Responden diluar Sampel Untuk Item Ganjil (X)	62
8. Hasil Uji Coba Skala Sikap Kepada 10 Orang Responden diluar Sampel Untuk Item Ganjil (Y)	62
9. Distribusi Antara Item Ganjil (X) Dengan Item Genap (Y).....	63
10. Interpretasi Nilai r	65
11. Daftar Nama Tim Pendiri SMK N 7 Bandar Lampung	72
12. Daftar Nama Tim Perencana SMK N 7 Bandar Lampung	73
13. Kondisi Sarana dan Prasarana SMK Negeri 7 Bandar Lampung	74
14. Distribusi Skor Hasil Angket Dari Indikator Inspirator	78
15. Distribusi Frekuensi Indikator Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik SMK sebagai Inspirator	81
16. Distribusi Skor Hasil Angket Dari Indikator Motivator	81

17. Distribusi Frekuensi Indikator Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik SMK sebagai Motivator	84
18. Distribusi Skor Hasil Angket Dari Indikator Fasilitator	85
19. Distribusi Frekuensi Indikator Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik SMK sebagai Fasilitator.....	88
20. Distribusi Hasil Angket Variabel Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik SMK (X)	88
21. Distribusi Frekuensi Indikator Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik SMK.....	91
22. Distribusi Skor Hasil Angket Dari Indikator <i>Civic Disposition</i> (Watak Kewarganegaraan)	92
23. Distribusi Frekuensi Esensi Mata Pelajaran PPKn dengan indikator <i>Civic Disposition</i>	95
24. Distribusi Skor Hasil Angket Dari Indikator <i>Civic Skill</i> (Keterampilan Kewarganegaraan)	95
25. Distribusi Frekuensi Esensi Mata Pelajaran PPKn dengan indikator <i>Civic Skill</i>	98
26. Distribusi Skor Hasil Angket Dari Indikator <i>Civic Knowledge</i> (Pengetahuan Kewarganegaraan)	99
27. Distribusi Frekuensi Esensi Mata Pelajaran PPKn dengan indikator <i>Civic Knowledge</i>	101
28. Distribusi Hasil Angket Variabel Esensi Mata Pelajaran PPKn (Y) ...	102
29. Distribusi Frekuensi Indikator Esensi Mata Pelajaran PPKn	105
30. Perbandingan Jumlah Responden Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik SMK (X) dan Esensi Mata Pelajaran PPKn (Y) di SMK Negeri 7 Bandar Lampung	106
31. Kontingensi Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan terhadap Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung.....	108
32. Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan terhadap Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kompetensi Dasar PPKn	45
2. Kerangka Pikir.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Penetapan Komisi Pembimbing Skripsi
3. Surat Kesediaan Pembimbing I Skripsi
4. Surat Kesediaan Pembimbing II Skripsi
5. Surat Pengesahan Susunan Komisi Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
6. Surat Keterangan Judul dari Dekan FKIP Universitas Lampung
7. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan Dari Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Bandar Lampung
9. Lembar Persetujuan Seminar Proposal
10. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal
11. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing I
12. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing II
13. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas I
14. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas II
15. Surat Rekomendasi Perbaikan Proposal Pembimbing I
16. Surat Rekomendasi Perbaikan Proposal Pembimbing II
17. Surat Rekomendasi Perbaikan Proposal Pembahas I
18. Surat Rekomendasi Perbaikan Proposal Pembahas II
19. Surat Rekomendasi Perbaikan Proposal
20. Surat Izin Penelitian
21. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Bandar Lampung

22. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
23. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Hasil
24. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing I
25. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing II
26. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas I
27. Surat Rekomendasi Perbaikan Hasil Pembimbing I
28. Surat Rekomendasi Perbaikan Hasil Pembimbing II
29. Surat Rekomendasi Perbaikan Hasil Pembahas I
30. Kisi-Kisi Angket Penelitian
31. Angket Penelitian
32. Uji Coba Angket
33. Kunci Jawaban Angket Penelitian
34. Dokumentasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Pendidikan di Indonesia memiliki jenjang mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi dan diwajibkan belajar 12 tahun hingga kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain Sekolah Menengah Atas, pendidikan di Indonesia juga memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah yang mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja sesuai dengan bidang kejuruannya dan dibekali dengan ilmu praktik. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “ pendidikan menengah merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.”

Pendidikan adalah sebagaimana yang tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk lebih siap terjun di dunia kerja serta mengembangkan sikap profesional. Dalam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 2 macam pelajaran, yaitu pelajaran umum dan pelajaran kejuruan. Pelajaran umum merupakan mata pelajaran wajib seperti yang terdapat di Sekolah Menengah Atas (SMA) seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKn dan sebagainya. Sedangkan pelajaran kejuruan merupakan mata pelajaran yang hanya terdapat dalam bidang kejuruan tertentu.

SMK Negeri 7 Bandar Lampung merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berada di Bandar Lampung, SMK Negeri 7 Bandar Lampung memiliki 8 Bidang Studi Keahlian. Berikut ini 8 Jurusan yang terdapat di SMK N 7 Bandar Lampung.

Tabel 1.1 Daftar Kejuruan SMK N 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.

No	Jurusan	Rombongan Belajar Kelas X-XII
1	TKR (Teknik Kendaraan Ringan)	5 Kelas
2	TSM (Teknik Sepeda Motor)	3 Kelas
3	TKJ (Teknik Komputer Jaringan)	5 Kelas
4	Multimedia	3 Kelas
5	Keperawatan	6 Kelas
6	Farmasi	6 Kelas
7	Akuntansi	5 Kelas
8	Pemasaran	3 Kelas
Jumlah		36 Kelas

Sumber: Dokumentasi SMK Negeri 7 Bandar Lampung

Tabel 1.2 Daftar Peserta Didik SMK N 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.

Jumlah Keseluruhan Peserta Didik Setiap Kelas								
Kelas X			Kelas XI			Kelas XII		
L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
136	226	362	139	184	323	181	190	371
Jumlah Total Keseluruhan Peserta Didik					1056 Peserta Didik			

Sumber: Rekapitulasi Data Peserta Didik SMK Negeri 7 Bandar Lampung

Seperti sekolah menengah pada umumnya, SMK Negeri 7 Bandar Lampung dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada lulusan SMP/MTs. yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang SMK. Seperti SMK pada umumnya tidak hanya mata pelajaran keahlian yang diberikan kepada peserta didik, SMK Negeri 7 Bandar Lampung juga memberikan mata pelajaran umum seperti yang ada di SMA, salah satunya adalah mata pelajaran PPKn.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang dapat membentuk suatu pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku seseorang. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) juga sangat penting bagi warga negara agar menjalankan kehidupan bermasyarakat sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam Pancasila. Dengan mempelajari PPKn peserta didik diharapkan dapat memenuhi tujuan negara yang terdapat didalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan adanya PPKn peserta didik di Indonesia dapat memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang lebih tinggi serta dapat berpartisipasi dalam segala kegiatan negara. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa PPKn merupakan ilmu yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mata pelajaran PPKn dipelajari mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Dalam mata pelajaran PPKn memiliki aspek totalitas materi yaitu Pendidikan Nilai Moral Pancasila, Pendidikan Politik dan Kenegaraan, Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dilihat dari aspek totalitas materi PPKn memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dalam PPKn memiliki pembelajaran nilai moral pancasila, yaitu untuk mengkaji aspek-aspek perilaku pengetahuan, keterampilan dan watak/karakter warganegara yang sesuai dengan nilai-nilai moral pancasila. Dengan mempelajari pendidikan nilai moral pancasila, manusia bisa menjadikan moral sebagai pegangan dalam mengatur tingkah laku di kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya pelajaran PPKn memiliki pembelajaran yang membahas mengenai politik dan kenegaraan, yaitu untuk mengkaji aspek-aspek hak dan kewajiban warganegara, peran serta dalam melakukan pemecahan masalah sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari, dengan mempelajari politik dan kenegaraan dalam PPKn kita bisa belajar untuk mengemukakan pendapat, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah serta pentingnya suatu hak pilih dalam kegiatan negara yaitu Pemilu.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) juga mempelajari mengenai hukum dan kemasyarakatan, yaitu untuk mengkaji upaya penyadaran dan pembinaan terhadap kesadaran hukum baik sebagai individu maupun anggota masyarakat sebagai upaya mewujudkan ketertiban umum. Sehingga dalam suatu negara memiliki pedoman untuk mengatur, menertibkan, mengarahkan, dan membimbing kehidupan bermasyarakat demi terciptanya negara yang aman, damai dan sejahtera. Pendidikan Kewarganegaraan, mengkaji upaya pembentukan diri warganegara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan perilaku nyata dalam kehidupan sebagai cerminan warga negara yang cerdas dan berkarakter. Sehingga dengan mempelajari PPKn warga negara dapat berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

Kenyataannya, tidak mudah untuk mewujudkan itu semua karena untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dari sejak duduk dibangku sekolah harus sudah ditanamkan kecintaan terhadap mata pelajaran PPKn. PPKn sangatlah penting guna menanamkan sikap dan karakter bagi para peserta didik terutama siswa SMK agar saat terjun di dunia kerja, peserta didik dapat bersikap dengan baik. Namun, ternyata tidak sedikit peserta didik SMK mereka mengesampingkan mata pelajaran PPKn dan mereka menganggap itu bukan mata pelajaran yang penting. Mereka kurang antusias terhadap pelajaran PPKn, seperti ribut di kelas, mengobrol, bercanda saat pelajaran bahkan ada peserta didik yang keluar masuk izin ke toilet yang menyebabkan saat pelajaran PPKn berlangsung menjadi kurang kondusif.

Dalam kenyataannya PPKn masih dipandang sebelah mata oleh sebagian peserta didik sekolah menengah, pada penelitian ini tertuju pada peserta didik SMK dimana mereka masih menganggap pelajaran PPKn tidak penting. Peran guru disini sangat penting guna meningkatkan minat peserta didik SMK dalam mata pelajaran PPKn, guru diharapkan dapat berperan sebagai motivator bagi peserta didik SMK bahwa PPKn sangat penting untuk membentuk karakter warga negara Indonesia. Tidak hanya membentuk karakter, PPKn juga mampu memberikan perubahan sikap dan perilaku dalam masyarakat baik dari segi agama, suku, bangsa dan sebagainya. Namun, Dari hasil observasi yang telah dilakukan, tidak jarang peserta didik SMK kurang bersungguh-sungguh saat pelajaran PPKn dilihat dari tingkah mereka yaitu masih banyak peserta didik yang mengobrol saat pelajaran bahkan kurang antusias saat belajar, itu terjadi karena masih kurangnya pemahaman pelajaran PPKn. Jika mereka paham akan makna pelajaran PPKn, peserta didik akan mengerti mengenai etika berbicara, peserta didik juga akan lebih bisa menghormati saat ada seseorang yang sedang berbicara dan berperilaku baik saat ada guru yang menjelaskan didepan kelas.

Berdasarkan Dikmenjur (Kurnia dan Sulistiowati, 2016) dijelaskan bahwa:

“Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan yaitu menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara mandiri atau mengisi lapangan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan bidang dan program keahlian yang diminati, membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati dan membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK) agar mampu mengembangkan diri sendiri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.”

Seperti yang sudah dijelaskan di atas peserta didik SMK dipersiapkan agar dapat terjun ke dunia kerja, dan dibekali dengan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktik. Dari hasil observasi dan wawancara beberapa fakta di lapangan menyebutkan banyak peserta didik SMK yang tidak kondusif di kelas saat mata pelajaran PPKn karena menganggap itu bukan pelajaran utama dalam bidang kejuruannya. Peserta didik SMK hanya tekun dan antusias saat pelajaran yang sesuai dengan bidang kejuruannya, terutama saat kelas praktik mereka lebih bersemangat untuk belajar.

Persaingan dunia kerja saat ini sangatlah ketat, namun dalam prosesnya calon pekerja tidak hanya di nilai dari *skill* seseorang saja melainkan dari berbagai macam aspek. Selain *skill* dilihat juga dari bagaimana pribadi seseorang tersebut baik dalam sikap dan perilaku, jika seseorang memiliki kemampuan serta pengetahuan yang tinggi namun memiliki perilaku yang buruk itu semua tidak ada artinya. Maka dari itu PPKn hadir untuk membentuk karakter warga negara Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berkarir.

Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa untuk mendaftar pegawai negeri sipil, salah satu tes nya yaitu tes wawasan kebangsaan. Sebagaimana dalam tes tersebut merupakan materi PPKn, tujuannya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan dan untuk mengimplementasikan nilai-nilai empat pilar kebangsaan Indonesia yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa peserta didik SMK dipersiapkan untuk bekerja, selain mengasah pengetahuan dan kemampuan dibidang kejuruannya, pengetahuan peserta didik SMK harus diseimbangkan dengan pelajaran PPKn yang akan menanamkan watak atau karakter bagi peserta didik. Sebagai contoh meskipun peserta didik SMK dengan bidang kejuruan perhotelan memiliki kemampuan yang memadai tetapi jika tidak dibekali dengan pengetahuan tentang pelajaran PPKn maka peserta didik tersebut mungkin kurang mengetahui bagaimana seharusnya beretika dihadapan pengunjung. Namun dalam wawancara terhadap peserta didik SMK masih banyak yang beranggapan bahwa mata pelajaran PPKn itu bukanlah pelajaran yang penting saat mereka masuk ke dunia kerja, mereka menganggap hanya ilmu bidang kejuruannya yang dapat memberikan mereka peluang untuk bekerja, karena jika mereka paham dan mengimplementasikan nya di kehidupan maka itu dapat dijadikan nilai lebih pada saat terjun ke dunia kerja, karena sikap seseorang dapat menentukan bagaimana nasibnya.

Maka dari itu materi PPKn dalam pembelajaran di sekolah terutama SMK juga diperlukan dan tidak boleh dianggap sebelah mata karena PPKn di SMK bertujuan agar saat terjun ke dunia kerja siswa tersebut sudah memiliki bekal mengenai karakter warga negara Indonesia yang memiliki ciri religius, jujur, adil, disiplin, toleran, bertanggung jawab dan sadar akan hak dan kewajiban warga negara Indonesia, karena jika peserta didik paham akan pembelajaran PPKn maka peserta didik akan mengerti seberapa pentingnya mata pelajaran PPKn itu.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Terhadap Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Minat peserta didik SMK dalam belajar mata pelajaran PPKn.
2. Pemahaman tentang mata pelajaran PPKn terhadap peserta didik SMK.
3. Tanggapan peserta didik SMK terhadap mata pelajaran PPKn.
4. Pentingnya mata pelajaran PPKn di sekolah.
5. Peran guru dalam meningkatkan minat peserta didik SMK

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah pada peran guru dalam meningkatkan minat peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan terhadap mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan juga pembatasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Terhadap Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019?”**

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran guru dalam meningkatkan minat peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan terhadap mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis dalam penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya PPKn dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan karena mengkaji upaya pembentukan diri warganegara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan perilaku nyata dalam kehidupan sebagai cerminan warganegara yang cerdas dan berkarakter.

b) Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu:

1) Peserta Didik

Kegunaan bagi peserta didik adalah untuk menambah pengetahuan serta memberikan pemahaman bahwa PPKn merupakan mata pelajaran yang sama pentingnya dengan pelajaran kejuruan serta dapat diimplementasikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Tenaga Pendidik

Kegunaan bagi tenaga pendidik adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan pengetahuan bagi tenaga pendidik khususnya guru PPKn di SMK untuk meningkatkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran khususnya mata pelajaran PPKn.

3) Sekolah

Bagi sekolah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi sekolah untuk mengadakan pembaharuan atau pengembangan proses pembelajaran dikelas, baik dalam cara mengajar guru, model pembelajaran, media pembelajaran dan lain sebagainya, khususnya dalam mata pelajaran PPKn.

4) Peneliti

Kegunaan bagi peneliti adalah untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pendidikan agar memiliki model pembelajaran yang disukai oleh peserta didik dalam pelajaran PPKn.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini dalam ruang lingkup ilmu pendidikan, khususnya PPKn pada kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang membahas pembentukan diri warganegara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan perilaku nyata dalam kehidupan sebagai cerminan warganegara yang cerdas dan berkarakter.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peran guru dalam meningkatkan minat peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan terhadap mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X dan XI SMK Negeri 7 Bandar Lampung.

4. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 7 Bandar Lampung.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan nomor surat 7119/UN26.13/PN.01.00/2018, kemudian dilanjutkan dengan penelitian setelah seminar proposal dengan dikeluarkannya surat izin penelitian pada tanggal 22 Februari 2019 dengan nomor surat 1609/UN26.13/PN.05.02.00/2019 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung dan penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 9 April sampai dengan tanggal 22 April 2019.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Peran Guru

a. Pengertian Peran

Menurut Cohen (Syarbaini dan Rusdiyanta, 2009: 60) “peran (*role*) adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.” Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Selaras dengan pendapat diatas menurut Supardi (2011: 88) “peran dapat didefinisikan sebagai keteraturan perilaku yang diharapkan dari individu.” Dengan demikian peran tidak dapat lepas dari status dengan hak dan kewajibannya dalam kedudukannya.

Sebagaimana yang dikemukakan Abdulsyani (2007: 94-95) peran merupakan sebagai berikut:

“Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru. Oleh karena itu peranan dapat didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Dengan singkat peran dapat

dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat.”

Menurut Levinson (Syarbaini dan Rusdiyanta, 2009: 60) paling sedikit peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep tentang ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

b. Pengertian Guru

Di sekolah, guru hadir untuk mengabdikan diri kepada umat manusia dalam hal ini anak didik. Negara menuntut generasinya yang memerlukan pembinaan dan bimbingan dari guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, menjelaskan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Berdasarkan penjelasan di atas guru merupakan pendidik yang melakukan tugas pendidikan dan pengajaran untuk membimbing tingkah laku, sikap dan perbuatan agar dapat menanamkan sikap yang lebih baik bagi peserta didik.

Selaras dengan pendapat di atas menurut Hamid (Hestia, Hasyim dan Nurmalisa, 2013: 5) “guru adalah kondisi yang diposisikan sebagai garda terdepan dan posisi sentral di dalam proses pembelajaran.” Sedangkan menurut Djamarah (2005: 1) “guru adalah unsur manusiawi dalam

pendidikan. Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan.” Berdasarkan penjelasan diatas guru memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan demi melaksanakan tanggung jawabnya kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya menurut Suprihatiningrum (2016: 24) “guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan peserta didik dalam proses pembelajaran.” Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan dalam merancang program pembelajaran, serta mampu menata dan mengelola kelas agar siswa dapat belajar dan pada akhirnya mendapat tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.

Berdasarkan definisi yang telah didefinisikan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa guru memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran dikelas serta memiliki kemampuan sesuai dengan bidang keahliannya. Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu mengimbangi bahkan melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat.

c. Peran Guru

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Menurut Djamarah (2005: 43-48) peran guru adalah sebagai berikut:

1. Korektor

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda ini harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat.

2. Inspirator

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik.

3. Informator

Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.

4. Organisator

Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Semua diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri anak didik.

5. Motivator

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi,

guru dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya disekolah.

6. Inisiator

Dalam peranannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan.

7. Fasilitator

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Oleh karena itu menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan anak didik.

8. Pembimbing

Peranan guru tidak kalah pentingnya dari semua peran yang telah disebutkan di atas, adalah sebagai pembimbing. Peranan ini harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap.

9. Demonstrator

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat anak didik pahami. Apalagi anak didik yang memiliki inteligensi yang sedang. Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik, guru harus berusaha dengan membantunya, dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis, sehingga apa yang guru sejalan

dengan pemahaman anak didik, tidak terjadi kesalahan pengertian antara guru dan anak didik.

10. Pengelola Kelas

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif.

11. Mediator

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media nonmaterial maupun materiil. Media berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaksi edukatif.

12. Supervisor

Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervisi harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar menjadi lebih baik.

13. Evaluator

Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Sebagai evaluator, guru tidak hanya

menilai produk (hasil pengajaran), tetapi juga menilai proses (jalannya pengajaran).

2. Pengertian Minat

Menurut Slameto (2015: 180) mengemukakan bahwa “minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menuruh.” Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Selaras dengan pengertian di atas menurut Djaka (Palupi, Holillulloh dan Yanzi, 2015: 5) menyatakan “minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap kejurusan suatu hal yang berharga bagi orang, sesuatu yang berharga bagi seseorang adalah sesuai dengan kebutuhannya. Minat juga diartikan kecenderungan untuk mempelajari sesuatu lebih baik.”

Menurut Hurlock (Kambuaya, 2016: 160) menyatakan bahwa “minat merupakan hasil dari pengalaman atau proses belajar.” Selanjutnya Hurlock (Kambuaya, 2016: 160) mengatakan bahwa minat memiliki dua aspek yaitu:

- 1) Aspek Kognitif
Aspek kognitif, didasarkan atas konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. Konsep yang membangun aspek kognitif didasarkan atas pengalaman dan apa yang dipelajari dari lingkungan
- 2) Aspek Afektif
Aspek afektif adalah konsep yang membangun konsep kognitif dan dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan dan dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan atau objek yang menimbulkan minat.

3. Pengertian Peserta Didik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa “peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.” Kemudian menurut Dirman & Cicih (Prayoga, Pitoewas & Yanzi, 2016: 8) “peserta didik adalah siapa saja yang mengikuti proses pembelajaran dari bayi sampai kakek-kakek bisa menjadi peserta didik.”

Menurut Danim (Suardi, Pitoewas & Yanzi, 2015: 5) “peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal.” Selanjutnya menurut Nizar (Suardi, Pitoewas & Yanzi, 2015: 5) menjelaskan bahwa “peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan.”

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi atau kemampuan yang terdapat pada dirinya sehingga perlu dikembangkan melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

a. Pengertian SMK

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “ pendidikan menengah merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan

dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.”

Berdasarkan pendapat diatas, pendidikan menengah merupakan sebagai lanjutan dari SMP atau MTs. Sekolah dijenjang pendidikan dan jenis kejuruan bernama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat serta mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu agar menciptakan lulusan yang siap bekerja sesuai dengan program kejurannya. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.

b. Tujuan SMK

Seperti yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, “pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.” Tujuan tersebut dapat dijabarkan lagi oleh Dikmenjur (Kurnia & Sulistiowati, 2016: 2) terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum pendidikan menengah kejuruan adalah:

- a. Menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak;
- b. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik;
- c. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab;
- d. Menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; dan
- e. Menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan dan seni.

Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara mandiri atau mengisi lapangan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan bidang dan program keahlian yang diminati;
- b. Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati; dan
- c. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK) agar mampu mengembangkan diri sendiri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan SMK bukan hanya untuk mempersiapkan peserta didik bekerja, melainkan bertujuan agar peserta didik SMK lebih mandiri dan menanamkan sikap ulet serta gigih dalam menyiapkan diri untuk terjun kedalam dunia kerja sehingga mereka dapat belajar bagaimana berkompetensi dimulai sejak dini agar kemampuan mereka dapat meningkat dan lebih bekerja keras lagi dibidang kejuruannya.

5. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha sadar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam proses belajar agar memiliki perkembangan dalam hal kecerdasan maupun kepribadian yang terdapat didalam diri seorang peserta didik tersebut.

Selanjutnya menurut Muhajir (Kadir dkk, 2012: 59) secara bahasa

“pendidikan berasal dari bahasa Yunani, *paedagogy*, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan. Pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan *Paedagogos*. Dalam bahasa Romawi pendidikan diistilahkan sebagai *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada didalam. Dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan *to educate* yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual.”

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki makna seorang peserta didik yang diantar pergi dan pulang sekolah oleh seorang pelayan atau dapat diartikan sebagai orangtua agar peserta didik dapat melatih pengetahuan serta memperbaiki moral agar dapat lebih dikembangkan.

Pendidikan dalam arti luas menurut Mudyahardjo (Kadir dkk, 2012: 59)

“pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.

Pendidikan adalah segala situasi hidup yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup.” Sedangkan pendidikan dalam arti sempit

menurut Kadir dkk (2012: 60) “pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan

oleh sekolah terhadap anak yang bersekolah agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.”

Definisi pendidikan menurut Langeveld (Kadir dkk, 2012: 61)

“pendidikan sebagai setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan pada anak tertuju pada pendewasaan anak itu, atau membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.”

Selanjutnya menurut Rousseau (Kadir dkk, 2012: 61) “pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak akan tetapi diperlukan pada masa dewasa.”

Menurut Dewantara (Kadir dkk, 2012: 62) “pendidikan sebagai tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan menuntun segala kekuatan pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.”

Berdasarkan uraian mengenai definisi pendidikan menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan individu/kelompok tertentu melalui kegiatan pengajaran yang berlangsung seumur hidup dalam rangka mempersiapkan manusia untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki serta memberi bekal ilmu kecerdasan bagi peserta didiknya baik dalam kegamaan, kepribadian dan bermasyarakat, guna membentuk sikap sehingga peserta didik dapat mengerti akan pendewasaan dalam dirinya.

b. Tujuan Pendidikan

Setiap kegiatan, selalu dihadapkan pada tujuan yang ingin dicapai. Jika segala usaha tidak mempunyai tujuan maka usaha tersebut tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian tujuan merupakan faktor yang penting dalam setiap kegiatan termasuk pendidikan. Secara umum tujuan pendidikan dapat dikatakan membawa anak ke arah tingkat kedewasaan.

Menurut Dewey (Suharto, 2016: 86) tujuan pendidikan dapat di klasifikasikan dalam dua kategori, yaitu *means* dan *ends*. *Means* merupakan tujuan yang berfungsi sebagai alat yang dapat mencapai *ends*. *Means* adalah tujuan “antara”, sedangkan *ends* adalah tujuan “akhir”.

Dengan kedua kategori ini, tujuan pendidikan harus memiliki tiga kriteria, yaitu (1) tujuan harus dapat menciptakan perkembangan yang lebih baik daripada kondisi yang sudah ada; (2) tujuan itu harus fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan keadaan; (3) tujuan itu harus mewakili kebebasan aktivitas.

Menurut Langeveld (Kadir dkk, 2012: 81-82) tujuan pendidikan dibedakan menjadi enam tujuan pendidikan yaitu:

“(1) tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai di akhir proses pendidikan, yaitu tercapainya kedewasaan jasmani dan rohani peserta didik; (2) tujuan khusus adalah tujuan tertentu yang hendak dicapai berdasar usia, jenis kelamin, sifat, bakat, inteligensi, lingkungan sosial budaya, tahap-tahap perkembangan, tuntutan syarat pekerjaan, dan sebagainya; (3) tujuan tidak lengkap adalah tujuan yang menyangkut sebagian aspek manusia, misalnya tujuan khusus pembentukan kecerdasan saja, tanpa memerhatikan yang lainnya; (4) tujuan sementara adalah proses untuk mencapai tujuan umum tidak dapat dicapai secara sekaligus, karenanya perlu ditempuh setingkat demi setingkat; (5) tujuan intermedier adalah tujuan perantara bagi tujuan lainnya yang pokok; (6) tujuan

insidental adalah tujuan yang dicapai pada saat-saat tertentu, yang sifatnya sketika dan spontan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan pada intinya bahwa tujuan pendidikan adalah usaha untuk mencerdaskan peserta didik serta mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik tersebut.

Namun, dalam pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan ada beberapa macam bentuk-bentuk tujuan yang merupakan tujuan akhir dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh untuk membentuk peserta didik yang memiliki kedisiplinan sebagai tujuan akhirnya maka diperlukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan akhir tersebut, misalnya pendidik memiliki tujuan untuk menanamkan sikap disiplin peserta didik dengan langkah-langkah membiasakan peserta didik agar datang tepat waktu guna mencapai tujuan akhir yaitu terciptanya kedisiplinan.

c. Teori-Teori Pendidikan

Menurut Kadir dkk (2012: 141) teori pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan praktik-praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, dan manajemen sekolah. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan teori pendidikan. Suatu kurikulum dan rencana pembelajaran disusun dengan mengacu pada teori pendidikan.

1) Teori Pendidikan Klasik (*Classical Education*)

Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, seperti perenialisme, essensialisme, dan eksistensialisme, yang

memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan klasik ini lebih menekankan peranan isi pendidikan dari pada proses. Isi pendidikan atau materi diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo dulu yang telah disusun secara logis dan sistematis. Dalam praktiknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih doominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif, sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Pendidikan klasik menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum subjek akademis, yaitu suatu kurikulum yang bertujuan memberikan pengetahuan yang solid serta melatih peserta didik menggunakan ide-ide dan proses “penelitian”, melalui metode ekspositori dan inkuiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, seperti yang sudah dijelaskan bahwa teori pendidikan klasik ini lebih menekankan peranan isi pendidikan dari pada proses. Sehingga dalam terori ini peserta didik memiliki peran pasif dan pendidik memiliki peran besar dalam proses belajar mengajar. Dalam kaitannya, jika siswa SMK bersikap pasif dan hanya sebagai penerima informasi yang disampaikan oleh pendidik tanpa siswa mengerti lebih lanjut makna dari mata pelajaran PPKn maka siswa tersebut menganggap mata pelajaran PPKn bukan suatu pelajaran yang penting. Berbeda jika siswa tidak bersikap pasif, mereka dapat memaknai setiap

materi PPKn dan mengerti bahwa mata pelajaran PPKn sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) **Teori Pendidikan Personal (*Personalized Education*)**

Teori pendidikan ini bertolak belakang dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik hanya menempati posisi kedua, yang lebih berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator dan pelayan peserta didik.

Berdasarkan pemahaman diatas bahwa teori ini bertolak belakang dari teori pendidikan klasik, dimana dalam teori ini pendidikan berguna untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Dalam kaitannya, siswa menjadi *center* dalam mengembangkan pengetahuan-pengetahuan dibidang pendidikan sehingga siswa lebih aktif dalam memaknai pelajaran PPKn sesuai dengan pemahaman siswa itu sendiri, sehingga pendidik berperan sebagai fasilitator dalam berjalannya pembelajaran PPKn.

3) **Teori Pendidikan Interaksional**

Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya.

Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerja sama dan interaksi.

Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak dari pendidik kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada pendidik. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi ini terjadi melalui berbagai bentuk dialog.

Dalam pendidikan interksional, belajar lebih sekedar mempelajari fakta-fakta. Peserta didik mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahaminya dalam konteks kehidupan.

Pendidikan interaksional menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum rekontruksi sosial, yaitu model kurikulum yang memiliki tujuan utama menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Peserta didik didorong untuk mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak (*crucial*) dan bekerja sama untuk memecahkannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam teori ini menekankan kepada interaksi sosial baik antara pendidik dengan peserta didik serta peserta didik dengan materi pembelajaran. Dalam kaitanya, sebagai contoh jika pendidik menjelaskan materi PPKn serta

melakukan interaksi dengan baik terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran PPKn, maka peserta didik akan lebih mudah memahami dan mengerti makna pelajaran PPKn. Sehingga dari interaksi tersebut peserta didik lebih mudah untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peserta didik dapat menyikapi dan mengatasi masalah-masalah yang ada dimasyarakat seperti contoh pelanggaran HAM.

6. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Sejarah Perkembangan PPKn di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan Taniredja (2013: 11-16) kehadiran program PKn dalam kurikulum sekolah-sekolah di Indonesia dapat dikatakan masih muda apabila dibandingkan dengan kehadirannya pelajaran *civics* di Amerika Serikat yang sudah diajarkan mulai 1790, dalam rangka “meng-Amerika-kan” bangsa Amerika. Menurut sejarah bangsa Amerika Serikat berasal dari berbagai bangsa yang datang ke Amerika Serikat, untuk menjadi Bangsa Amerika Serikat. Untuk menyatukan warga negara Amerika Serikat menjadi satu bangsa, maka pelajaran *civics* diajarkan di sekolah-sekolah. Dalam taraf tersebut pelajaran *civics* membicarakan masalah pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara dan *civics* merupakan bagian dari Ilmu Politik. Di Indonesia pelajaran *Civics*, setelah Indonesia merdeka baru dimulai pada 1950. Hal ini terjadi karena sejak 1945-1950 bangsa Indonesia

sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya (revolusi fisik). Dalam garis-garis program pelajaran untuk SMA terdapat Pelajaran kewarganegaraan, yang dikatakan bahwa kewarganegaraan yang diberikan di samping tata negara adalah tugas dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah, masyarakat dan keluarga serta diri sendiri.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pelajaran Civics dipakai untuk memberi pengertian tentang pidato kenegaraan presiden ditambah dengan Pancasila, sejarah pergerakan, hak dan kewajiban warga negara. Buku pegangan resmi adalah *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)* yang disusun oleh Supardo dkk. Semuanya itu dalam rangka *nation and character building* dan usaha untuk menimbulkan pengertian jiwa patriotisme di kalangan para murid.

Pada 1961 setelah kewarganegaraan diganti kewargaan negara stas prakarsa Suhardjo maksud penggantian tersebut untuk disesuaikan dengan pasal 26 ayat (2) UUD 1945 dan menitikberatkan pada warga. Yang mengandung pengertian akan hak dan kewajibannys terhadap negara. Tetapi istilah kewargaan negera baru dipakai secara resmi pada 1967 dengan instruksi Direktorat Jenderal Pandidikan Dasar No 31 Tahun 1967.

Pada 1966 (awal Orde Baru) buku *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesa (Civics)* dilarang dipakai sebagai buku pegangan di sekolah-sekolah, Untuk mengisl kekosongan materi *civics* (kewargaan negara) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi, bahwa

materi civics adalah Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan Ketetapan MPRS, dan Perserikatan Bangsa Bangsa. Materi tersebut ditambah dengan Orde Baru, Sejarah Indonesia dan Ilmu Bumi Indonesia.

Pada 1975 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila. Mata pelajaran ini memiliki dasar konstitusional, yaitu Ketetapan MPR No IV MPR/1973 (tentang GBHN) yang menyatakan "Untuk mencapai cita-cita tersebut maka kurikulum di semua tingkat pendidikan, mulai dari taman kanak kanak sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila. Dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda."

Secara lengkap, landasan formal pergantian istilah Pendidikan Kewargaan Negara menjadi Pendidikan Moral Pancasila adalah Ketetapan MPR No IV/MPR/1973 j.o Ketetapan MPR No IV/ MPR/1978 j.o Ketetapan MPR No /MPR/ 1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menghendaki agar:

- a. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b. Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan. dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan

mengembangkan jiwa dan semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda makin ditingkatkan dalam kurikulum masyarakat pegangan sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta dan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut di atas, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengganti Pendidikan Kewargaan Negara dengan Pendidikan Moral Pancasila. Dengan Surat Keputusan Mendikbud RI No 088d/U/1975 dan No 008c/U/1975 tanggal 15 Januari 1975 dibakukanlah kurikulum untuk SD, SMP dan SMA sebagai pengganti kurikulum 1968. Walaupun dalam kurikulum 1975 masih tertulis dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara, kemudian menyusul pengumuman resmi, bahwa Pendidikan Kewargaan Negara diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila. Kurikulum 1975 termasuk di dalamnya PMP dirintis pelaksanaannya mulai 1976.

Digantinya kurikulum 1975 dengan kurikulum 1994, Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pergantian ini senada dengan tujuan pendidikan yang ada di dalam Ketetapan MPR No II/ MPR/ 1998, Tentang GBHN, bahwa pendidikan nasional bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan trampil serta sehat jasmani dan rohani. Di samping itu juga

disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat di dalam UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan demikian, PPKn ditetapkan atas dasar ketentuan yang tersirat di dalam Undang-Undang No 2 tahun 1989 pasal 39 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk penjelasannya yang menyatakan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah PPKn ini lebih dikuatkan dan ditegaskan dengan keluarnya keputusan Mendikbud RI No 061/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Kurikulum Sekolah Menengah Umum tanggal 25 Februari 1993, yang antara lain menyebutkan bahwa Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan untuk wahana mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral, yang berakar pada Budaya Bangsa Indonesia.

Perkembangan berikutnya dengan keluarnya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka PPKn diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Istilah-istilah yang pernah

ada dalam kurikulum sekolah di Indonesia, yang mungkin ada hubungannya dengan istilah dan definisi *civics* adalah:

- a. Kewarganegaraan (1957) yang isi pelajarannya adalah membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.
- b. *Civics* (1961), yang isinya lebih banyak membahas tentang Sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan, yang terutama diarahkan untuk *nation and character building* bangsa Indonesia seperti pada waktu pelaksanaan pelajaran *civics* di Amerika Serikat pada tahun-tahun setelah *Declaration of Independence*.
- c. Pendidikan Kewarganegaraan (1968), sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum SD, SMP dan SMA tahun 1968, istilah yang digunakan adalah Pendidikan Kewarganegaraan, sedangkan materinya sebagai berikut:
 - 1) SD, pelajaran Sejarah Indonesia, *Civics*, dan Ilmu Bumi.
 - 2) SMP, program ini mengidentikkan *Civics* dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang isinya 30% Sejarah Kebangsaan, 30% kejadian setelah Indonesia merdeka dan 40% UUD.
 - 3) SMA, bahan pelajaran sebagian besar terdiri dari UUD 1945.

Menurut Soemantri (1976) (Taniredja, 2013:15)

Secara historis menurut Rosyada (Taniredja, 2013:16) dalam tatanan kurikulum pendidikan nasional terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi pendidikan demokrasi di Indonesia, yaitu *Civics* (1957/1962), Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan integrasi

Sejarah, Ilmu Bumi dan Kewargaan Negara (1964), Pendidikan Kewargaan Negara (1968/1969), Pendidikan Kewargaan Negara, *Civics* dan Hukum (1973), Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (1975/1984) dan PPKn (1994). Kurikulum 2013 juga memuat adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada awalnya materi *civics* meliputi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan Ketetapan MPRS, dan Perserikatan Bangsa Bangsa lalu materi tersebut ditambah dengan Orde Baru, Sejarah Indonesia dan Ilmu Bumi Indonesia.

Namun seiring perkembangan zaman pendidikan kewarganegaraan juga ikut berkembang dan berubah-ubah namanya menyesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan dalam pendidikan di Indonesia. Pada akhirnya PPKn tetap mengacu terhadap Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

b. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Menurut Somantri (Naharani, Yanzi, & Pitoewas, 2017: 6) menyebutkan bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa untuk berfikir kritis, analisis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa PPKn merupakan pelajaran demokrasi yang selanjutnya dikembangkan serta diperluas cakupan materinya. Agar dapat melatih sikap demokratis peserta didik dan diselarskan dengan sikap yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 guna menjadi warganegara yang dapat diandalkan.

Menurut Zamroni (Taniredja, 2013: 2) “pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.” Demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation*, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa.

Sebagaimana yang tertulis dalam Modul Kapita Selekt PKn (Rohman, 2018: 14) pengertian PPKn adalah:

“pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warganegara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PPKn merupakan mata pelajaran yang dapat membentuk karakter peserta didik agar dapat memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila untuk mewujudkan cita-cita negara.

c. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sesuai yang dikemukakan Zubaedi (2011: 281) menyebutkan bahwa:

“tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga menjadi warganegara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut.”

Berdasarkan pengertian diatas tujuan PPKn adalah guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelajaran PPKn bahwa pedoman negara tertuju pada Pancasila sehingga warganegara dapat berperilaku sesuai nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Selanjutnya menurut Azra (2015: 18) Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia yang antara lain:

- a. membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; dan
- c. mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu, kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.

Berdasarkan tujuan PPKn diatas dapat disimpulkan PPKn bertujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia agar warga Indonesia dalam aspek demokrasi yaitu dapat membentuk sikap bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memiliki wawasan demokrasi yang kritis.

Dalam lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 (Winataputra, 2012: 158) secara normatif dikemukakan bahwa “mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.” Sedangkan tujuannya, digariskan dengan tegas adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.

- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencatutan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli diatas, dapat disimpulkan tujuan pelajaran PPKn pada dasarnya suatu pelajaran pembentukan karakter agar dapat menciptakan warganegara Indonesia yang berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, anggota masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Serta bertujuan agar warga negara memiliki kemampuan berfikir kritis dan rasional terhadap perkembangan demokrasi politik yang ada di negara Indonesia agar menjadikan warganegara yang dapat mewujudkan cita-cita Negara seperti yang terdapat didalam UUD 1945.

d. Fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Berdasarkan yang tertulis didalam modul Diagnostik Kesulitan Belajar yang dikemukakan Rohman (2018: 21-22) fungsi pendidikan kewarganegaraan ialah:

“(1) Mengembangkan dan melestarikan nilai luhur pancasila secara dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan dalam masyarakat, tanpa kehilangan jatidiri sebagai Bangsa Indonesia, yang Merdeka bersatu dan berdaulat; (2) Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (3) Membina pengalaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warganegara dengan negara antar warga negara dengan sesama warga negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibanya sebagai warga negara.

Selanjutnya seperti yang tertulis dalam Modul Kapita Selekta PKN yang dikemukakan Rohman (2018: 22)

“mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan suatu wahana yang berfungsi melestarikan nilai luhur Pancasila, mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya serta membina pengalaman dan kesadaran warga negara untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang mampu diandalkan oleh bangsa dan negara.”

Seperti halnya mata pelajaran lainnya, pada mata pelajaran PPKn di sekolah memiliki rambu-rambu dalam proses pembelajarannya. Rambu-rambu ini berfungsi untuk menjadi acuan guru mata pelajaran PPKn dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai fungsi PPKn, dapat disimpulkan fungsi PPKn sebagai wahana pendidikan karakter dan pendidikan nilai Pancasila merupakan *filter* bagi warganegara agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetap sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

e. **Objek Kajian PPKn**

Menurut Wahab & Sapriya (2011: 316) “pendidikan kewarganegaraan adalah bidang kajian yang bersifat *multifaset* dengna konteks lintas bidang keilmuan yang bersifat *interdisipliner/ multidisipliner/ multidimensional*.” Namun secara filsafat keilmuan bidang studi ini memiliki objek kajian pokok ilmu politik khususnya konsep demokrasi politik (*political democracy*) untuk aspek hak dan kewajiban (*duties and*

rights of citizen). Dapat disimpulkan bahwa objek kajian PPKn tidak akan jauh dari kajian pokok dalam ilmu politik yang mencakup hak dan kewajiban dalam berpolitik.

Menurut Somantri (Wahab & Sapriya, 2011: 316) menyatakan bahwa objek studi *Civics* dan *Civic Education* adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Dalam lokakarya metodologi Pendidikan Kewarganegaraan (Wahab & Sapriya, 2011: 316) dikemukakan bahwa objek studi *Civics* adalah tingkah laku; tipe pertumbuhan berpikir; potensi yang ada dalam setiap diri warga negara; hak dan kewajiban; cita-cita dan aspirasi; kesadaran (patriotisme, nasionalisme, saling pengertian internasional, moral pancasila; dan usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggung jawab.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dijadikan sebagai objek kajian PPKn adalah warganegara dengan mengkaji mengenai perilaku, sifat dan sikap, dalam seluruh kegiatan baik dalam bermasyarakat, keluarga dan juga dalam wilayah pendidikan agar terciptanya karakter warga negara yang bertanggung jawab, bermoral Pancasila serta memiliki kesadaran tinggi terhadap rasa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi.

f. Ruang Lingkup PPKn

Berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006 (Winataputra, 2012: 159)

ruang lingkup mata pelajaran PPKn untuk pendidikan dasar dan menengah

secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, Hukum dan Peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
3. Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan Warga Negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa PPKn memiliki

ruang lingkup yang meliputi: (1) persatuan dan kesatuan bangsa; (2)

norma, hukum dan peraturan; (3) hak asasi manusia; (4) kebutuhan warga negara; (5) konstitusi negara; (6) kekuasaan dan politik; (7) Pancasila; (8) globalisasi. Dimana semua ruang lingkup tersebut saling berkaitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna memberikan pemahaman bahwa PPKn menjadikan warganegara yang dapat hidup rukun dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan bela negara dan juga dapat mematuhi norma-norma yang berlaku di Indonesia serta mematuhi hukum dan peraturan yang ada agar terciptanya Indonesia adil dan bertoleransi pada sesama dengan Pancasila yang dijadikan pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seperti yang terdapat dalam Kurikulum 2013 (Naharani, Yanzi, & Pitoewas, 2017: 6-7) ruang lingkup PPKn sebagai berikut:

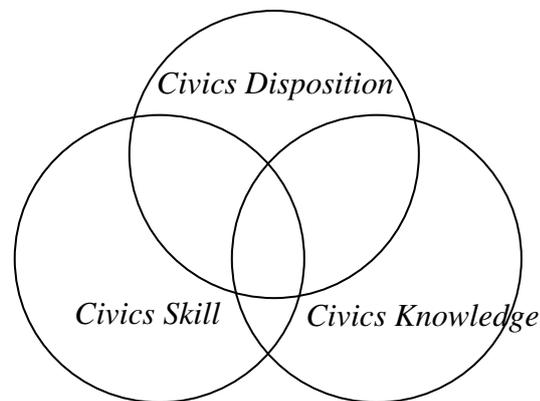
1. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa.
2. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Kesatuan republik Indonesia
4. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup PPKn yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika atau disebut juga sebagai empat pilar kebangsaan yang berguna agar warga negara memiliki pengetahuan dan untuk mengimplementasikan nilai-nilai empat pilar kebangsaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai acuan

berkewarganegaraan yang baik. Bahwasanya ruang lingkup PPKn ini menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman kehidupan warganegara dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia serta dengan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi landasan keberagaman bangsa Indonesia.

g. Kompetensi Dasar PPKn

Paradigma baru PPKn menerapkan pola pikir baru dengan hasil belajar yang dimiliki peserta didik, hal ini dijelaskan pada gambar berikut :



Gambar 2.2 : Kompetensi Dasar PPKn

Sumber : Udin S, 2006

Diagram diatas seperti yang dijelaskan Azra (2015: 16-17) menggambarkan bahwa mata pelajaran PPKn terdiri dari tiga kompetensi dasar antara lain kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yaitu kemampuan dan kecakapan mahasiswa untuk menjelaskan ruang lingkup materi PPKn (*Civic Education*); kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) yaitu kemampuan dan kecakapan mahasiswa yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara, antara lain komitmen menjadikan Pancasila dan demokrasi

sebagai prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa di Indonesia, menjunjung kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM serta memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi dilingkungannya; dan kompetensi ketrampilan kewarganegaraan (*civic skill*) yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan, maupun kemampuan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya.

Seorang warga negara sekarang masih kurangnya pemahaman tentang pengetahuan kewarganegaraan, karena masih terjadi perilaku yang menyimpang dimasyarakat. Mereka belum paham akan implementasi PPKn baik dibidang politik, hukum, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. PPKn hadir untuk memberikan pengetahuan bagaimana menjadikan warga negara yang memiliki karakter bangsa Indonesia. Mata pelajaran PPKn sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga jika kita mendalami setiap dimensi yang ada maka dalam kegiatan sehari-hari seperti mengerti akan pentingnya HAM, memiliki toleransi yang tinggi, mematuhi hukum yang berlaku, menghargai setiap perbedaan yang ada sehingga tidak adanya perpecahan yang terjadi.

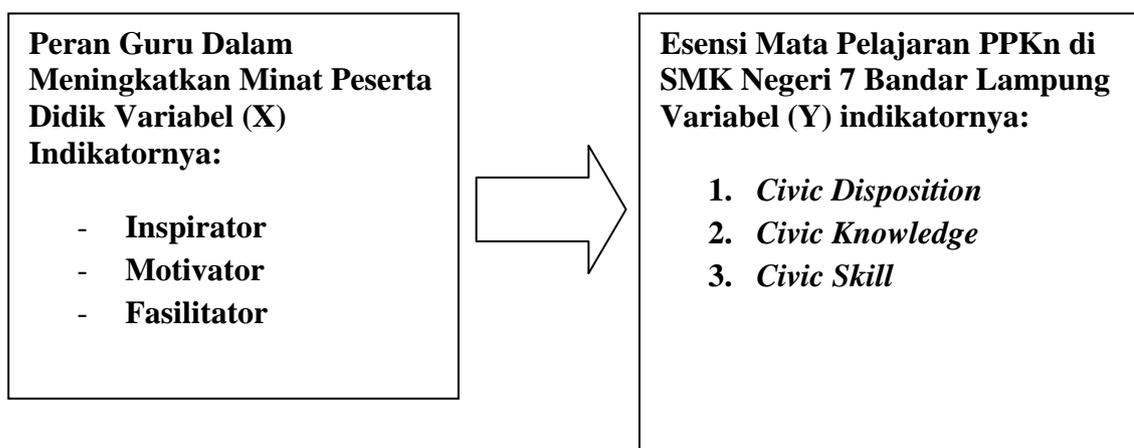
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak siswa maupun warganegara yang belum paham bagaimana mengimplementasikan PPKn dalam kehidupan bermasyarakat.

Kompetensi dasar PPKn seperti yang sudah dijelaskan diatas memiliki keterkaitan satu sama lain. Mata pelajaran PPKn membantu agar peserta didik dapat mendalami kompetensi dasar yang ada sehingga berkaitan satu sama lain saat menjalankan kehidupan sebagai warganegara. *Civic knowledge* mencakup bidang pengetahuan agar dimensi ini memberikan pengetahuan mengenai pengetahuan politik, hukum, nilai maupun moral agar sejalan dengan *civic skill* guna warganegara dapat mengimplementasikan nya di kehidupan berbangsa dan bernegara serta diselaraskan dengan *civic disposition* supaya warganegara memiliki penguasaan watak atau karakter sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.

B. Kerangka Pikir

Saat ini masih banyak permasalahan yang sering terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Salah satu permasalahan tersebut adalah mulai dari *pembullying*, perkelahian antar siswa hingga tawuran antar sekolah. Banyak juga permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti diskriminasi, tidak toleransi antar umat beragama, perkelahian antar suku dan masih banyak lagi. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak sekali peserta didik yang belum paham akan penting nya mata pelajaran PPKn sehingga tidak dapat mengimplementasikan dengan baik di kehidupan bermasyarakat.

PPKn dapat membentuk sikap terutama peserta didik. Jika peserta didik dapat memahami pentingnya mata pelajaran PPKn, permasalahan tersebut mungkin tidak akan terjadi. Dalam kenyataannya masih banyak peserta didik yang menganggap mata pelajaran PPKn bukanlah pelajaran wajib atau pelajaran penting, padahal pelajaran PPKn ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, baik dalam bermasyarakat maupun dalam dunia kerja.



Gambar 2.3 : Kerangka Pikir

C. Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokal

Penelitian oleh Eko Putra Wijaya yang berjudul: “Peran Guru Dalam Pembentukan Perilaku Bertanggung Jawab Peserta Didik”. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Guru Dalam Mewujudkan Perilaku Bertanggung Jawab Peserta Didik Dalam Pembelajaran PKn di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 77 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa guru cukup berperan dalam mewujudkan perilaku bertanggung jawab peserta didik dalam pembelajaran PKn. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu memiliki persamaan membahas mengenai peran guru didik dalam bidang pendidikan, perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang peran guru dalam meningkatkan minat siswa sekolah menengah pertama dalam mata pelajaran PPKn, sedangkan penelitian tersebut meneliti peran guru dalam mewujudkan perilaku bertanggung jawab peserta didik dalam pembelajaran PKn.

2. Nasional

Penelitian oleh Karolus Charlaes Bego yang berjudul: “Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Siswa dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Siswa.” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Flores Tahun 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Siswa dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Siswa. Metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh siswa kelas IX program studi khusus olahraga sebanyak 27 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah peran guru PKn dalam membentuk karakter siswa yaitu sebagai sosok yang memegang amanah, sebagai sosok yang memberi teladan, sebagai sosok yang mendidik dengan hati membangun sebuah motivasi. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu memiliki persamaan membahas mengenai peran guru, perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang peran guru dalam meningkatkan minat siswa SMK mengenai mata pelajaran PPKn, sedangkan penelitian tersebut meneliti tentang peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter siswa dan implikasinya terhadap ketahanan siswa.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Whitney (Hamdi, 2014: 5) ”metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu , termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.” Metode deskriptif ini merupakan metode yang tepat untuk menganalisis kenyataan berdasarkan fakta di lapangan karena, menggunakan teknik pokok angket dan teknik penunjang wawancara.

Menurut Noor (2017: 38) “penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.”

Oleh sebab itu penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini sangat tepat, karena sasaran penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang peran

guru dalam meningkatkan minat peserta didik sekolah menengah kejuruan terhadap mata pelajaran PPKn dan menganalisis sesuai data yang diperoleh.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Martono (2012: 74) “populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.” Selanjutnya menurut Arikunto (2010: 173) “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.”

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X dan XI SMK N 7 Bandar Lampung Periode 2018/2019.

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Peserta Didik SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.

Jumlah Keseluruhan Peserta Didik Setiap Kelas					
Kelas X			Kelas XI		
L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
136	226	362	139	184	323
Jumlah Total			685 Peserta Didik		
Keseluruhan Peserta Didik					

Sumber: Rekapitulasi Data Peserta Didik SMK Negeri 7 Bandar Lampung Periode 2018/2019

2. Sampel

Menurut Martono (2012: 74) “sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat

mewakili populasi.” Selanjutnya menurut Arikunto (2010: 174) “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.”

Pengambilan sampel penelitian ini peneliti berpedoman menurut Arikunto (2006: 134), cara pengambilannya dapat dilakukan sebagai berikut: Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidaknya-tidaknya dari:

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana.
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.
- c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik.

Jumlah peserta didik kelas X dan XI mencapai 685 orang. Berdasarkan pendapat diatas maka jumlah sampel di ambil 10% dari jumlah populasi. Maka jumlah peserta didik yang menjadi sampel di SMK Negeri 7 Bandar Lampung adalah 65 orang. Lebih rincinya digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Data Sampel Peserta Didik Kelas X SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.

No.	Kelas	Jumlah	Sampel
1.	X TKR	36	$36 \times 10\% = 4$
2.	X TSM	29	$29 \times 10\% = 3$
3.	X TKJ	31	$31 \times 10\% = 3$
4.	X MM	29	$29 \times 10\% = 3$
5.	X KK-1	34	$34 \times 10\% = 3$

No.	Kelas	Jumlah	Sampel
6.	X KK-2	31	31 x 10% = 3
7.	X FM-1	35	35 x 10% = 3
8.	X FM-2	34	34 x 10% = 3
9.	X AK-1	35	35 x 10% = 3
10.	X AK-2	34	34 x 10% = 3
11.	X Pemasaran	34	34 x 10% = 3
Jumlah		34 Peserta Didik	

Sumber: Data Sekunder (Pengolahan data sampel)

Tabel 3.3 Data Sampel Peserta Didik Kelas XI SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.

No.	Kelas	Jumlah	Sampel
1.	XI TKR-1	25	25 x 10% = 2
2.	XI TKR-2	24	24 x 10% = 2
3.	XI TSM	16	16 x 10% = 2
4.	XI TKJ-1	24	24 x 10% = 2
5.	XI TKJ-2	22	22 x 10% = 2
6.	XI MM	28	28 x 10% = 3
7.	XI KK-1	29	29 x 10% = 3
8.	XI KK-2	26	26 x 10% = 3
9.	XI FM-1	29	29 x 10% = 3
10.	XI FM-2	34	34 x 10% = 3
11.	XI AK-1	24	24 x 10% = 2
12.	XI AK-2	24	24 x 10% = 2
13.	XI Pemasaran	18	18 x 10% = 2
Jumlah		31 Peserta Didik	

Sumber: Data Sekunder (Pengolahan data sampel)

C. Variabel Penelitian

Variabel merupakan pusat perhatian di dalam penelitian kuantitatif.

Menurut Martono (2012: 55) “variabel didefinisikan sebagai konsep yang memiliki variasi atau memiliki lebih dari satu nilai.” Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang memengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi

lebih dulu. Variabel yang dapat mempengaruhi disebut dengan variabel X, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah peran guru dalam meningkatkan minat peserta didik.

2. Variabel terikat (*dependent variabel*)

Variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel Y, yang menjadi variabel Y dalam penelitian ini adalah mata pelajaran PPKn.

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Untuk memahami objek permasalahan dalam penelitian ini secara jelas maka diperlukan pendefinisian variabel secara konseptual dan operasional :

1. Definisi Konseptual

- a. Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.
- b. Guru adalah guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- c. Mata Pelajaran PPKn adalah usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

2. Definisi Operasional

a. Peran guru dalam meningkatkan minat siswa menjadi objek pada penelitian ini. Indikator sebagai berikut:

1) Inspirator

Guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik.

2) Motivator

Guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya disekolah.

3) Fasilitator

Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Oleh karena itu menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan anak didik.

Dengan tingkat keterlaksanaan yang diukur yaitu:

1) Sangat berperan

2) Cukup berperan

3) Kurang berperan

b. PPKn adalah usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar. Mata pelajaran PPKn memiliki tiga dimensi yaitu, *Civic Disposition*, *Civic Knowledge* dan *Civic Skill*. Dalam dimensi mata pelajaran PPKn indikatornya sebagai berikut:

1) *Civic Disposition*

Dimensi kemampuan dan kecakapan (*Civic Disposition*) warganegara yang menjadikan Pancasila dan demokrasi sebagai prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa di Indonesia. Dengan memiliki karakter peduli terhadap sesama, toleransi, demokrasi, serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait.

2) *Civic Knowledge*

Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) yang mencakup bidang politik, hukum, dan moral.

3) *Civic Skill*

Dimensi keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skill*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Rencana Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran guru dalam meningkatkan minat peserta didik SMK (X) diukur melalui skala sikap berdasarkan skor skala 1-3, yaitu:

- a) Berperan
- b) Cukup Berperan
- c) Tidak Berperan

Melalui pengukuran indikator:

- 1) Inspirator
- 2) Motivator
- 3) Fasilitator

2. Mata pelajaran PPKn yang diukur melalui skala sikap dan tes pemahaman.

Dalam indikator *Civic Skill* dan *Civic Disposition* diukur melalui skala sikap berdasarkan skala 1-3, yaitu:

- a) Selalu
- b) Kadang-Kadang
- c) Tidak Pernah

Selanjutnya dalam indikator *Civic Knowledge* diukur melalui tes pemahaman berdasarkan nilai yang diperoleh peserta didik dengan rentang 1-15 berdasarkan indikator paham, cukup paham dan tidak paham.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pokok

a. Angket

Menurut Arikunto (2010: 194) “angket atau kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.” Sasaran angket dalam penelitian ini adalah peserta didik SMK Negeri 7 Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini menggunakan angket yang bersifat tertutup, sehingga responden menjawab pertanyaan dari tiga alternatif jawaban yaitu : (a), (b), (c) yang setiap jawaban diberi nilai bervariasi.

- a. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberi nilai/skor tiga (3).
- b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberikan nilai/skor (2).
- c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan akan diberi nilai/skor satu (1).

2. Teknik Penunjang

a. Wawancara

Menurut Arikunto (2010: 198) “interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).” Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang ada dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Wawancara dilakukan terhadap peserta didik dan guru SMK Negeri 7 Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010: 201) “dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis.” Dokumentasi dilakukan dengan mencatat data tertulis tentang jumlah peserta didik SMK Negeri 7 Bandar Lampung sesuai dengan jurusannya.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2010: 211) “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen.” Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Dalam penelitian ini untuk uji validitas menggunakan *logical validity* dengan cara “*expert judgement*”, yaitu dengan mengonsultasikan kepada tenaga pengajar di lingkungan Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Dalam hal ini peneliti mengonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Dari hasil konsultasi tersebut setelah dinyatakan valid maka angket dapat digunakan dan diadakan revisi atau perbaikan sesuai dengan keperluan.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2010: 221) “reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.” Uji coba angket dilakukan dengan teknik belah dua dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyebar angket untuk di uji cobakan dengan 10 orang di luar responden

2. Soal angket di kelompokkan menjadi teknik dua belah yaitu item ganjil dan item genap
3. Kemudian hasil item ganjil dan item genap dikorelasikan ke dalam rumus *Product Moment* yaitu :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien kolerasi antara variabel X dan variabel Y

X : Skor rata-rata dari X

Y : Skor rata-rata dari Y

N : Jumlah Sampel

Selanjutnya dicari reliabilitas dengan menggunakan rumus *Spearman-Brown*, sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{2 (r_{gg})}{1 + (r_{gg})}$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien reabilitas seluruh item

r_{gg} : Koefisien antara item X dan Y

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kriteria Reliabilitas

Nilai	Kriteria
0,80 – 1,00	Sangat Tinggi
0,60 – 0,79	Tinggi
0,40 – 0,59	Cukup
0,20 – 0,39	Rendah
➤ 0,20	Sangat Rendah

Tabel 3.5 Hasil Uji Coba Skala Sikap Kepada 10 Orang Responden diluar Sampel Untuk Item Ganjil (X)

No.	Nomor Item Ganjil (X)										Skor
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	
1	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2	25
2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	27
3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	27
4	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	26
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29
6	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	27
7	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	25
8	3	3	1	3	3	3	3	3	3	2	27
9	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29
10	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29
Total											271

Sumber: Analisis Data Uji Coba Skala Sikap

Dari hasil data tabel 3.5 diatas diketahui $\sum x = 271$ yang merupakan hasil penjumlahan skor uji coba skala sikap kepada 10 orang di luar responden dengan indikator item ganjil. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam tabel kerja hasil uji coba skala sikap antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrumen penelitian.

Tabel 3.6 Hasil Uji Coba Skala Sikap Kepada 10 Orang Responden diluar Sampel Untuk Item Genap (Y)

No.	Nomor Item Genap (Y)										Skor
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
1	2	3	2	2	3	3	2	1	1	2	21
2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	25
3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	24
4	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	26

No.	Nomor Item Genap (Y)										Skor
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
5	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	26
6	3	3	1	3	2	3	3	2	3	3	26
7	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27
8	3	3	1	3	3	3	3	3	1	3	26
9	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	27
10	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	27
Total											255

Sumber: Analisis Data Uji Coba Skala Sikap

Dari hasil data tabel 3.6 diketahui $\sum y = 255$ yang merupakan hasil penjumlahan skor uji coba skala sikap kepada 10 orang di luar responden dengan indikator item genap. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam tabel kerja hasil uji coba skala sikap antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrumen penelitian. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Distribusi Antara Item Ganjil (X) Dengan Item Genap (Y)

No	X	Y	X ²	Y ²	X.Y
1	25	21	625	441	525
2	27	25	729	625	675
3	27	24	729	576	648
4	26	26	676	676	676
5	29	26	841	676	754
6	27	26	729	676	702
7	25	27	625	729	675
8	27	26	729	676	702
9	29	27	841	729	783
10	29	27	841	729	783
Jumlah	271	255	7365	6533	6923

Sumber: Analisis Data Uji Coba Skala Sikap

Data tabel tersebut merupakan hasil dari penggabungan hasil skor uji coba skala sikap kepada 10 orang diluar responden dengan indikator item ganjil (X) dengan item genap (Y). Hasil keseluruhan dari tabel kerja uji

coba skala sikap antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) akan dikorelasikan menggunakan rumus *Product Moment* untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi instrumen penelitian.

Berdasarkan data yang diperoleh diatas, maka untuk mengetahui reliabilitas selanjutnya dikorelasikan dan diolah dengan rumus *Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Diketahui:

$$\begin{aligned} \sum X &= 271 & \sum Y &= 255 & \sum X.Y &= 6923 \\ \sum X^2 &= 7365 & \sum Y^2 &= 6533 & N &= 10 \end{aligned}$$

Dengan mengacu rumus diatas, maka data yang ada dibuktikan dengan hasil sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{10 \times 6923 - (271)(255)}{\sqrt{\{10 \times 7365 - (271)^2\} \{10 \times 6533 - (255)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{69230 - 69105}{\sqrt{\{73650 - 73411\} \{65330 - 65025\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{125}{\sqrt{\{239\} \{305\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{125}{\sqrt{72895}}$$

$$r_{xy} = \frac{125}{269,99}$$

$$r_{xy} = 0,46$$

Untuk mengetahui reliabilitas alat ukur ini, maka dilanjutkan dengan menggunakan rumus *Spearman Brown* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{2 (rgg)}{1 + (rgg)}$$

$$r_{xy} = \frac{2 (0,46)}{1 + (0,46)}$$

$$r_{xy} = \frac{0,92}{1,46}$$

$$r_{xy} = 0,63$$

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.8 Interpretasi Nilai r

Nilai	Kriteria
0,80 – 1,00	Sangat Tinggi
0,60 – 0,79	Tinggi
0,40 – 0,59	Cukup
0,20 – 0,39	Rendah
➤ 0,20	Sangat Rendah

Dari hasil perhitungan dapat diketahui $r_{xy} = 0,63$, selanjutnya dikonsultasikan indeks reliabilitas yaitu reliabilitas 0,60 – 0,79 termasuk dalam kategori tinggi berarti skala sikap yang digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas tinggi. Dengan demikian skala sikap tentang Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Terhadap Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat digunakan dalam penelitian ini atau memenuhi syarat.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif yaitu diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan rumus interval sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I : Interval

NT : Nilai Tertinggi

NR : Nilai Terendah

K : Kategori

Selanjutnya menggunakan rumus presentase untuk mengetahui bentuk persentase data tersebut, dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Besar Persentase

F : Jumlah alternatif jawaban seluruh item

N : Jumlah perkaitan antara item dengan responden

Kemudian menggunakan kriteria untuk mengetahui banyaknya persentase data yang diperoleh, kriteria persentase sebagai berikut:

- 76%-100% : Baik
 56%-75% : Sedang
 40%-55% : Tidak Baik

Selanjutnya untuk menguji keeratan hubungan dilakukan dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat sebagai berikut:

$$x^2 = \sum_{i=1}^B \sum_{j=1}^n \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

(Sudjana, 2005: 280)

Keterangan :

- X^2 : Chi Kuadrat
 $\sum_{i=1}^B$: Jumlah Baris
 $\sum_{j=1}^n$: Jumlah Kolom
 O_{ij} : Frekuensi Pengamatan
 E_{ij} : Frekuensi yang diharapkan

Selanjutnya pengujian data menggunakan rumus kontingensi, sebagai berikut :

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2+n}}$$

(Sudjana, 2005: 282)

Keterangan:

- C : Koefisien Kontingensi
 X^2 : Chi Kuadrat

N : Jumlah Sampel

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefisien kontingensi maksimum yang bisa terjadi. Harga C maksimum dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$C_{\text{maks}} = \sqrt{\frac{M-1}{M}}$$

Keterangan:

C_{maks} : Koefisien Kontingensi

M : Harga minimum antara banyak baris dan kolom

Uji pengaruh makin dekat dengan harga C pada C maksimum maka makin besar derajat asosiasi antara variabel. Dengan kata lain, faktor yang satu semakin berkaitan dengan faktor yang lain, Sudjana (2005 : 282).

I. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu bentuk usaha persiapan sebelum melakukan penelitian yang sifatnya sistematis meliputi perencanaan, prosedur, dan teknis pelaksanaan di lapangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Adapun langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Persiapan Pengajuan Judul

Pada tahap awal yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian pendahuluan, setelah menemukan permasalahan maka peneliti mengajukan judul kepada dosen pembimbing akademik yang terdiri dari

dua alternatif judul. Setelah judul disetujui kemudian langkah selanjutnya diajukan kepada Ketua Program Studi PPKn dan disetujui sekaligus ditentukan dosen Pembimbing Utama yaitu Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. dan dosen Pembimbing Pembantu yaitu Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah judul penelitian disetujui oleh pembimbing akademik dan ketua program studi PPKn dan peneliti mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Nomor 7119/UN26.13/PN.01.00/2018. Penelitian ini dimulai dari melakukan penelitian pendahuluan di SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Adapun tujuan dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal penelitian.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan untuk dapat persetujuan dilaksanakannya seminar proposal. Setelah melalui proses konsultasi dan perbaikan-perbaikan proposal skripsi, proposal skripsi akhirnya disetujui oleh pembimbing II pada tanggal 26 November 2018 dan pembimbing I pada tanggal 3 Desember 2018. Kemudian melaksanakan seminar proposal pada tanggal 8 Januari 2019. Setelah seminar proposal dilaksanakan, peneliti melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran dan masukan dari tim dosen pembahas.

4. Pelaksanaan Penelitian

a) Persiapan Administrasi

Dengan membawa surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor 7119/UN26.13/PN.01.00/2018 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Bandar Lampung.

b) Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Sesuai dengan alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, maka penulis mempersiapkan angket mengenai Tes Pemahaman dan Skala Sikap yang akan diberikan kepada reponden yang berjumlah 65 responden dengan jumlah item pertanyaan tes 15 soal dan 20 soal item pertanyaan skala sikap yang terdiri dari tiga alternatif jawaban. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan skala sikap dan tes pemahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat kisi-kisi soal tentang Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Terhadap Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.
2. Mengkonsultasikan skala sikap dan tes pemahaman kepada Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Setelah skala sikap dan tes pemahaman tersebut disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, peneliti mengadakan uji coba

angket kepada sepuluh orang sebagai responden di luar sampel yang sebenarnya.

5. Pelaksanaan Uji Coba Angket

a) Analisis Validitas Angket

Langkah awal sebelum uji coba angket untuk mengetahui validitas angket penelitian, peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Setelah dinyatakan valid maka angket tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

b) Analisis Uji Reliabilitas Skala Sikap

Sebuah alat ukur akan dinyatakan baik apabila mempunyai reliabilitas yang baik pula, yaitu ketetapan suatu alat ukur. Hal ini dimaksudkan bahwa ketetapan alat ukur ini sangat berpengaruh dalam menentukan layak atau tidaknya suatu alat ukur untuk digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mengadakan uji coba skala sikap 10 orang di luar responden dengan teknik item ganjil dan genap.

Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam upaya untuk menguji reliabilitas skala sikap dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengadakan uji coba skala sikap kepada 10 orang responden diluar responden yang sebenarnya.
2. Hasil uji coba skala sikap tersebut dikelompokkan kedalam item ganjil dan item genap.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian khususnya analisis data seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai peran guru dalam meningkatkan minat peserta didik sekolah menengah kejuruan terhadap mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2018/2019, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran guru dalam meningkatkan minat dapat dikategorikan pada kategori berperan. Hal ini berdasarkan analisis data mengenai peran guru sebagai inspirator, motivator, dan fasilitator, dimana dalam hal sebagai inspirator guru berperan dalam memberikan inspirasi kepada peserta didik berupa memberikan keteladanan atau perilaku baik menjadi guru yang disiplin dan dapat menjadi inspirasi bagi peserta didiknya sehingga dapat meningkatkan minat peserta didik SMK terhadap mata pelajaran PPKn. Sebagai motivator dan fasilitator guru dapat menjalankan perannya dengan baik, guru dapat membangkitkan semangat berupa motivasi sebelum memulai pelajaran dan selalu memberikan apresiasi dalam bentuk nilai tambah agar memotivasi peserta didik supaya semangat dalam belajar.

2. Esensi mata pelajaran PPKn siswa SMK Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2018/2019. Dalam variabel esensi mata pelajaran PPKn lebih dominan dalam kategori cukup paham, dalam hal ini 46 responden atau sekitar 70,77% dari 65 responden sudah mampu memahami bahwa pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang dapat membentuk karakter siswa agar dapat memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila untuk mewujudkan cita-cita negara. dan mampu mengimplementasikan nya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga peran guru dalam meningkatkan minat peserta didik sekolah menengah kejuruan terhadap mata pelajaran PPKn padaa kategori berperan.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin memberi saran kepada:

1. Kepala Sekolah hendaknya untuk dapat memperhatikan kinerja seorang guru disekolah, baik dalam mengajar maupun dalam mendidik, agar terciptanya suatu pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti melaksanakan kegiatan supervisi secara terjadwal.
2. Guru PPKn hendaknya berperan secara maksimal kepada peserta didik agar dapat memberikan pemahaman terhadap mata pelajaran PPKn (*Civic Disposition, Civic Skill* dan *Civic Knowledge*). Dengan memberikan pembelajaran yang menarik dengan metode yang tepat sehingga peserta didik lebih semangat dalam mengikuti mata pelajaran

PPKn, seperti mengadakan permainan yang berkaitan dengan PPKn atau memberikan video-video mengenai sejarah Indonesia sehingga dapat membuat peserta didik lebih menarik dalam pelajaran PPKn

3. Peserta Didik hendaknya selalu giat dalam belajar, meskipun mata pelajaran PPKn bukan mata pelajaran kejuruan tetapi mata pelajaran PPKn sangat penting untuk membangun karakter peserta didik guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelajaran PPKn sehingga peserta didik dapat berperilaku sesuai nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra.U, Rozak.A. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Bego K.C. 2016. Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Siswa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Siswa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 5. No 3.
- Bumbungan, Busra.2016. Peran Guru Dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Karakter Di SMP Negeri 1 Bua Ponrang Kabupaten Luwu. *Prosiding Seminar Nasional*. Vol 2. No 1.
- Christopel. Kuntoro S.A. 2016. Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi Siswa Melalui Metode Inquiri Pada Pembelajaran PKn di SMA Negeri 1 Gamping Sleman. *Jurnal Pendidikan IPS*. Vol 3. No 1.
- Djamarah S.B. 2005. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamdi A.S. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hestia.H, Hasyim.A, & Nurmalisa.Y. 2013. Peranan Guru Dalam Menanamkan Nilai Kejujuran Pada Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 1. No 6.
- Kadir.A, Yuianto.E, Kurnianto.R, Fauzi.A, Baehaqi, Rosmiati & Nu'man.A. 2012. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Kambuaya, Carlos. 2016. Pengaruh Motivasi, Minat, Kedisiplinan Dan Adaptasi Diri Terhadap Prestasi Belajar Siswa Peserta Program Afirmasi Pendidikan Menengah Asal Papua Dan Papua Barat Di Kota Bandung. *Social Work Jurnal*. Vol 5. No 2.
- Kurnia N.D, Sulistiowati. 2016. Pengembangan Modul Elektronik Pada Mata Pelajaran *Aerodynamic And Flight Control* Materi Pokok Aerodinamika Yang Mempengaruhi Pesawat Udara Untuk Siswa Kelas X Di SMK Penerbangan Dharma Wirawan Pepabri Sidoarjo. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*. Vol 7. No 2.
- Kusumaningrum.Y.D. 2014. Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Pada Peserta Didik Di SMA Al Hikmah Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*. Vol 4. No 4.
- Martono, Nanang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Noor, Juliansyah. 2017. *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Naharani.D, Yanzi.H, & Pitoewas.B. 2017. Hubungan Budaya Sekolah dan Mata Pelajaran PPKn Dengan Pembentukan Sikap Sosial Pada Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 5. No 7.
- Palupi.N.K, Yanzi.H, & Pitoewas.B. 2015. Pengaruh Faktor Usia Terhadap Minat Dan Kemampuan Guru PPKn Dalam Penggunaan TIK. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 3. No 6.
- Iskandar.R, Rachmadtullah.R. 2017. Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Melalui Metode *Role Playing* Di Kelas IV Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol 1. No 2.
- Prayoga.R, Pitoewas.B, & Yanzi.H. 2016. Peranan Kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik Dalam Menyiapkan Peserta Didik Baru. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 4. No 2.
- Rohman. 2018. Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Aplikasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa Pada Siswa SMA Adiguna. *Prosiding Seminar Nasional Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung*.
- Sari.Y.M. 2014. Pembinaan Toleransi Dan Peduli Sosial Dalam Upaya Memantapkan Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol 23. No 1.

- Slameto. 2015. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suardi.A, Pitoewas.B & Yanzi.H. 2015. Studi Tingkat Kepatuhan Peserta Didik Jalur Bina Lingkungan dan Non Bina Lingkungan. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 3. No 2.
- Sudjana, Nana. 2005. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdikarya
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Toto. 2016. *Filsafat Pendidikan Islam Memperkuat Epistemologi Islam dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sulistiana, Indari. 2016. Implementasi Pengembangan *Civic Skill* Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Perbandingan Kurikulum 2006 dan 2013 Di SMP Kabupaten Temanggung. *Jurnal E-Civics*. Vol 5. No 7.
- Supardi. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Suprihatiningrum, Jamil. 2016. *Strategi Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Syarbaini.S, Rusdiyanta. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taniredja, Tukiran. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak.
- Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang RI Nomor 15, Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wahab A.A, Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya E.P. 2015. Peran Guru Dalam Pembentukan Perilaku Bertanggung Jawab Peserta Didik. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 3. No 8.
- Winataputra S.U. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumental dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.

Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.